

RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2025



**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah berpedoman pada Perubahan RKPD dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun berkenaan.

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025. Perubahan Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan, maka masukan yang bersifat membangun sangat diharapkan guna meningkatkan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Semoga Perubahan Rencana Kerja ini dapat menjadi acuan peningkatan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kuala Tungkal, 30 Juni 2025

KEPALA BAPENDA f



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
 BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I tahun berkenaan	7
2.2 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	15
 BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	17
 BAB IV PENUTUP	24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun berjalan yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah berpedoman pada Rancangan Perubahan RKPD dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun berkenaan. Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah terdiri atas perumusan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah mencakup analisis gambar pelayanan Perangkat Daerah, analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun berkenaan, penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja Perangkat Daerah memuat program-program sebagai penjabaran Renstra OPD dan RKPD, bertujuan untuk keselarasan dan kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah, dengan adanya Renja Perangkat Daerah akan dapat lebih menjamin konsistensi perencanaan dan juga sebagai pedoman pelaksanaan program pembangunan secara berkesinambungan dan sinergi dengan program-program K/L dan Provinsi. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam menyusun RKA Perangkat Daerah dalam proses penyusunan RAPBD.

Atas dasar hal tersebut Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat kedepan dapat menjalankan tugas-tugas pokok dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Harapan tersebut akan menjadi komitmen kami yang dapat dituangkan dalam suatu perencanaan yang dapat dijadikan acuan dalam penyelenggaraan dan pertanggungjawaban Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berupa “Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025”.

1. 2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan pijakan dalam perumusan dan penyusunan Rencana Kerja Tahunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten

Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 Nomor 1);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 13 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 4);
13. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026.
14. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 berpedoman pada Rancangan Perubahan RKPD dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun berkenaan, dimaksud sebagai Dokumen Perencanaan Program Kegiatan yang memuat sasaran yang akan

dicapai dalam tahun yang bersangkutan. Indikator kinerja sasaran dan target masing-masing indikator sasaran program yang direncanakan.

TUJUAN

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2025 adalah untuk:

- Menjabarkan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati kedalam Bentuk Kebijakan dan Program Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang lebih rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan.
- Sebagai Instrumen untuk mempermudah dalam mengukur Kinerja dan mengevaluasi kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam kurun waktu tertentu.
- Meningkatkan Efisiensi dan efektifitas Pemanfaatan Sumber-sumber Potensi Daerah. Terutama berkaitan dengan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
- Menjelaskan tugas – tugas pokok dalam rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

**BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI
DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN**

**2.1 Analisis Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat
Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun berkenaan**

**2.2 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah**

**BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH**

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan I

Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan I ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun berkenaan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra Perangkat Daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi, selanjutnya kedepan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas.

TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

NAMA SKPD : BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANJUNGPINANG BARAT

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/kegiatan) (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran Renja Perangkat daerah tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Trinulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat daerah yang bertanggung jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		KEUANGAN			108,631,646,000		45,835,378,536	13,723,912,583		2,551,710,064	0	0	0	2,551,710,064		48,181,180,446		44.35%		
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja		Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai AKUP	83,00		82.08														
		Program Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	70,00		78.44				2,460,190,064	0	0	0	2,460,190,064	2.08%	38,884,420,605	68.61%	50.47%		
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	77,042,198,000	66.55%	376,883,250	5 Dokumen	44,188,800	1 Dokumen	1,000,000	0	0	1,000,000	1 Dokumen	377,883,250	29 Dokumen	76.32%	25.62%	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	32 Dokumen	621,800,000	24 Dokumen	242,796,500	4 Dokumen	24,808,600	1 Dokumen	1,000,000			1,000,000	1 Dokumen	243,796,500	25 Dokumen	78.13%	39.21%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	72 Laporan	853,200,000	48 Laporan	134,086,750	12 Laporan	19,380,000							134,086,750	48 Laporan	66.67%	15.72%	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	6 Dokumen	45,406,000,000	4 Dokumen	26,329,213,962	1 Dokumen	8,067,070,383	Dokumen	1,479,762,735		0	1,479,762,735		27,808,976,697	4 Dokumen	66.67%	61.25%	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menikmati Gaji dan Tunjangan ASN	339 Orang/Bulan	41,960,000,000	187 Orang/Bulan	25,143,805,462	60 Orang/Bulan	7,805,100,383	45 Orang/Bulan	1,421,442,735			1,421,442,735		26,565,248,197	232 Orang/Bulan	68.44%	63.31%	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	TARGET RANSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2025 (Akhir Periode RANSTRA Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja RANSTRA Perangkat Daerah Tahun 2024	TARGET KINERJA dan Anggaran RANSTRA Perangkat Daerah Tahun 2025 yang divaluasi	Realisasi Kinerja Pada Tahun				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RANSTRA Perangkat Daerah Tahun 2025 yang divaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RANSTRA Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RANSTRA Perangkat Daerah tahun 2025 (%)	Unit Perangkat daerah yang bertanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Rp K 405,000,000 6 Paket	Rp K 136,955,950 4 Paket	Rp K 22,643,000 1 Paket	Rp K 3,208,000 Paket	Rp K 80,074,000 1 Paket	Rp K 900,000 Paket	Rp K 91,730,000 2 Paket	Rp K 0 3 Laporan	Rp K 3,208,000 Paket	Rp K 80,074,000 1 Paket	
		Penyediaan Perbaikan dan Penghapusan Kantor	Jumlah Paket Perbaikan dan Penghapusan Kantor yang Disediakan	Rp K 1,675,000,000 36 Paket	Rp K 1,154,432,000 9 Paket	Rp K 195,920,000 6 Paket	Rp K 80,074,000 1 Paket	Rp K 900,000 Paket	Rp K 91,730,000 2 Paket	Rp K 0 3 Laporan	Rp K 3,208,000 Paket	Rp K 80,074,000 1 Paket	Rp K 1,234,506,000 10 Paket	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Rp K 378,000,000 12 Paket	Rp K 142,385,000 8 Paket	Rp K 59,250,000 2 Paket	Rp K 900,000 Paket	Rp K 91,730,000 2 Paket	Rp K 0 3 Laporan	Rp K 91,730,000 2 Paket	Rp K 0 3 Laporan	Rp K 900,000 Paket	Rp K 143,285,000 8 Paket	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Rp K 1,175,000,000 18 Paket	Rp K 591,047,450 12 Paket	Rp K 108,166,000 3 Paket	Rp K 91,730,000 2 Paket	Rp K 91,730,000 2 Paket	Rp K 0 3 Laporan	Rp K 91,730,000 2 Paket	Rp K 0 3 Laporan	Rp K 91,730,000 2 Paket	Rp K 682,777,450 14 Paket	
		Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Perawatan Perundang-undangan yang Disediakan	Rp K 62,500,000 72 Dokumen	Rp K 40,880,000 48 Dokumen	Rp K 12,600,000 12 Dokumen	Rp K 91,730,000 2 Paket	Rp K 91,730,000 2 Paket	Rp K 0 3 Laporan	Rp K 91,730,000 2 Paket	Rp K 0 3 Laporan	Rp K 91,730,000 2 Paket	Rp K 40,880,000 66.67%	
		Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp K 4,285,000,000 72 Laporan	Rp K 2,637,038,478 48 Laporan	Rp K 672,937,000 12 Laporan	Rp K 91,730,000 2 Paket	Rp K 91,730,000 2 Paket	Rp K 0 3 Laporan	Rp K 91,730,000 2 Paket	Rp K 0 3 Laporan	Rp K 91,730,000 2 Paket	Rp K 2,701,519,377 70.83%	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp K 8,460,000,000 500,000,000	Rp K 1,290,531,197 66.67%	Rp K 341,912,000 16.67%	Rp K 327,182,000 16.67%	Rp K 327,182,000 16.67%	Rp K 64,480,899 3 Laporan	Rp K 327,182,000 16.67%	Rp K 327,182,000 16.67%	Rp K 327,182,000 16.67%	Rp K 1,617,713,197 83.33%	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Rp K 500,000,000 1 Unit	Rp K 449,900,000 1 Unit	Rp K 154,512,000 4 Unit	Rp K 327,182,000 16.67%	Rp K 327,182,000 16.67%	Rp K 64,480,899 3 Laporan	Rp K 327,182,000 16.67%	Rp K 327,182,000 16.67%	Rp K 327,182,000 16.67%	Rp K 0 0.00%	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Rp K 2,150,000,000 20 Unit	Rp K 1,150,000,000 10 Unit	Rp K 449,900,000 4 Unit	Rp K 327,182,000 16.67%	Rp K 327,182,000 16.67%	Rp K 64,480,899 3 Laporan	Rp K 327,182,000 16.67%	Rp K 327,182,000 16.67%	Rp K 327,182,000 16.67%	Rp K 589,682,000 27.43%	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang Disediakan	Rp K 860,000,000 260 Unit	Rp K 75,820,000 63 Unit	Rp K 154,512,000 4 Unit	Rp K 327,182,000 16.67%	Rp K 327,182,000 16.67%	Rp K 64,480,899 3 Laporan	Rp K 327,182,000 16.67%	Rp K 327,182,000 16.67%	Rp K 327,182,000 16.67%	Rp K 75,820,000 8.62%	

No	Sasaran	Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/Kapital (output))	Target Rencana Perangkat Daerah pada Tahun 2025 (Akhir Periode Rencana Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Rencana Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran Rencana Perangkat daerah tahun berjalan (2025) yang direvisasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana Perangkat Daerah s.d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Rencana Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran rencana Perangkat Daerah s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat daerah yang bertanggung jawab								
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	I				II		III		IV		12	13	14	15		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	323 Unit	4,450,000,000	16 Unit	11 Unit				11 Unit	167,400,000				0	187,400,000				11 Unit	87 Unit	26.93%	21.40%		
		Pengadaan Asat Tetap Lainnya	Jumlah Unit Asat Tetap Lainnya yang Disediakan	5 Unit	500,000,000																			0.00%	0.00%	
		Penyediaan Jasa Pemungutan Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pemungutan Urusan Pemerintahan Daerah	72 Laporan	6,281,196,000	12 Laporan	3 Laporan				3 Laporan	377,904,790	0				377,904,790				3 Laporan	51 Laporan	70.83%	21.19%		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	72 Laporan	101,100,000	12 Laporan	3 Laporan				3 Laporan	2,400,000					2,400,000				3 Laporan	51 Laporan	70.83%	37.78%		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72 Laporan	1,645,096,000	12 Laporan	3 Laporan				3 Laporan	36,054,790					36,054,790				3 Laporan	51 Laporan	70.83%	48.05%		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Umum Kantor yang Disediakan	72 Laporan	4,535,000,000	12 Laporan	3 Laporan				3 Laporan	339,450,000					339,450,000				3 Laporan	51 Laporan	70.83%	13.83%		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungutan Urusan Pemerintahan Daerah	Pemertaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungutan Urusan Pemerintahan Daerah	100%	5,435,500,000	16.67%	2.52%				2.52%	33,947,640	0				33,947,640				2.52%	65.97%	65.97%	39.07%		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaran Pemungutan Urusan atau Kendaran Dinas Jabatan	Jumlah Kendaran Pemungutan Urusan atau Kendaran Dinas Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaran Pemungutan Urusan atau Kendaran Dinas Jabatan	6 Unit	622,000,000	1 Unit																		0.00%		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Petrusan Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Petrusan Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan	262 Unit	1,835,000,000	40 Unit	Unit				Unit	1,575,400					1,575,400				Unit	167 Unit	63.74%	53.93%		

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Realisasi Kinerja Pada Trifurasi												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana Peringkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana Peringkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran rencana Peringkat Daerah s.d tahun 2025 (%)	Unit Perangkat daerah yang bertanggung jawab				
				I				II				III				IV						K	Rp	K	Rp
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
1	2	3	4	Target Renstra Peringkat Daerah pada Tahun 2025 (Akhir Periode Renstra Peringkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Peringkat Daerah sampai dengan Renja Peringkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran Renja Peringkat Daerah tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Peringkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Peringkat Daerah s.d tahun 2025 (Akhir Periode Renstra Peringkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Peringkat Daerah s.d tahun 2025 (Akhir Periode Renstra Peringkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran rencana Peringkat Daerah s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat daerah yang bertanggung jawab							
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
				7 Unit	2,400,000,000	5 Unit	174,444,000	1 Unit	235,750,000	2 Laporan	82,400,000	2 Laporan	82,400,000	11		174,444,000	71.43%								
				66 Laporan	2,410,000,000	44 Laporan	1,096,883,250	11 Laporan	272,964,000							1,179,283,250	69.70%								
				25 Laporan	3,200,000,000	17 Laporan	897,517,450	4 Laporan	7,100,000							897,517,450									
				15000 Obyek Pajak	3,685,000,000	14.033 Obyek Pajak	1,191,057,650	2500 Obyek Pajak	139,700,000	216 Obyek Pajak						1,191,057,650	94.99%								
				18 Dokumen	3,595,000,000	12 Dokumen	1,046,137,011	3 Dokumen	319,399,000	2 Dokumen						1,046,137,011	77.78%								
				320 Layanan	688,000,000	206 Layanan	44,244,200	60 Layanan	6,890,000	14 Layanan						44,244,200	68.75%								
				48 Dokumen	2,303,700,000	32 Dokumen	698,488,000	8 Dokumen	31,436,000							698,488,000	66.67%								
				55 Dokumen	4,700,000,000	40 Dokumen	1,746,575,300	10 Dokumen	462,845,800	2 Dokumen	9,120,000					1,755,795,300	76.36%								
				160 Dokumen	740,000,000	104 Dokumen	39,601,000	30 Dokumen	9,608,000							39,601,000	5.35%								

2.2. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pendapatan. Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan internal maupun eksternal yang menjadi tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, sebagai berikut :

Kekuatan yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mengelola Pendapatan Daerah antara lain :

1. Adanya Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
2. Tersedianya anggaran yang memadai dalam menggerakkan aktivitas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Adapun Kelemahan yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain :

1. Sumber daya manusia yang belum memadai khususnya dalam hal pendapatan daerah
2. Sarana dan Prasarana terbatas, berdampak kepada Kualitas dan Kuantitas Aparatur.
3. Peraturan Perundang – Undangan tentang Pajak/ Retribusi Daerah.

Peluang yang dimiliki oleh Badan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :

1. Adanya kebijakan otonomi daerah
2. Letak Geografis yang strategis dengan potensi pendapatan daerah yang belum dikelola secara optimal.
3. Adanya sistem dan prosedur serta pelimpahan wewenang sebagai dasar dan acuan mengelola keuangan daerah.

Beberapa permasalahan yang masih menjadi tantangan (ancaman) dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah antara lain :

1. Ketersediaan potensi sumber daya alam belum sepenuhnya dikelola dan bergantung kepada harga pasaran antara *Supply* dan *Demand*, seperti halnya harga pasar dunia untuk harga Walet yang tidak stabil.
2. Sistem pengelolaan keuangan di organisasi instansi pemerintah daerah belum sepenuhnya mampu dilaksanakan.
3. Masih rendahnya kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah didukung dengan regulasi peraturan daerah, anggaran yang memadai yang ditunjang ketersediaan personil dan mobilitas operasional yang memadai untuk lebih mengoptimalkan pengelolaan pendapatan daerah secara transparan. Peluang / potensi yang ada masih dapat untuk diberdayakan, didukung dengan aparatur dan Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan Daerah.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen rencana Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan. Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional.

Program adalah rangkaian kegiatan yang disusun secara sistematis berdasarkan isu-isu strategis sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan, penyusunan program pembangunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan terus berlanjut diprioritaskan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

No	Program dan Kegiatan	Sumber Dana
1	2	3
KEUANGAN		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	APBD
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	APBD
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	APBD
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	APBD
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	APBD

No	Program dan Kegiatan	Sumber Dana
1	2	3
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	APBD
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
7	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	APBD
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
8	Penyediaan Komponen Instalasi/ Penerangan Bangunan Kantor	APBD
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	APBD
10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	APBD
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	APBD
12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	APBD
13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	APBD
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
14	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	APBD
15	Pengadaan Mebel	APBD
16	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	APBD
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
17	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	APBD
18	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	APBD
19	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	APBD
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	APBD
21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	APBD
22	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	APBD
23	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	APBD
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		
24	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	APBD
25	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	APBD
26	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	APBD
27	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	APBD

No	Program dan Kegiatan	Sumber Dana
1	2	3
28	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	APBD
29	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	APBD
30	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	APBD
31	Penetapan Wajib Pajak Daerah	APBD
32	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	APBD
33	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	APBD
34	Penagihan Pajak Daerah	APBD
35	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	APBD
36	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	APBD
37	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	APBD

TABEL 3.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2025
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

No	Kode Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	REKJA 2025				Lokasi	REKJA PERUBAHAN 2025				Sumber Dana
			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Tahun 2024	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Seluruh Perubahan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Tahun 2024	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-7	13
5.02		KEUANGAN			23,657,000,000	13,124,394,383				13,668,773,383	542,379,000	
5.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOKOTA		100%	16,910,000,000	11,483,452,183		Penertase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100%	11,917,396,183	433,944,000	
5.02.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		5 Dokumen	350,000,000	34,438,800		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	38,038,800	3,600,000	
5.02.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		4 Dokumen	150,000,000	20,308,800	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	23,908,800	3,600,000	APBD
5.02.01.2.01.06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		12 Laporan	200,000,000	14,130,000	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	14,130,000	-	APBD
5.02.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1 Dokumen	9,060,000,000	8,081,070,383		Jumlah Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	1 Dokumen	8,081,070,383	-	
5.02.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		60 Orang/Bulan	8,400,000,000	7,805,100,383	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang/Bulan	7,805,100,383	-	APBD
5.02.01.2.02.02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 Dokumen	475,000,000	248,280,000	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	248,280,000	-	APBD
5.02.01.2.02.04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			-	APBD
5.02.01.2.02.07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		12 Laporan	185,000,000	7,690,000	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	7,690,000	-	APBD
5.02.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		12 Laporan	100,000,000	1,218,000		Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 Laporan	1,218,000	-	
5.02.01.2.03.06		Perencanaan Barang Milik Daerah pada SKPD		12 Laporan	100,000,000	1,218,000	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	1,218,000	-	APBD
5.02.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		1 Dokumen	200,000,000	100,200,000		Jumlah Dokumen Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Dokumen	102,450,000	2,250,000	
5.02.01.2.05.02		Pengadaan Pakan Dinas Beserta Alrut Kelengkapannya		2 Paket	200,000,000	100,200,000	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Paket Pakan Dinas beserta Alrut Kelengkapannya	2 Paket	102,450,000	2,250,000	APBD
5.02.01.2.05.09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		-	-	APBD

No	Kode Kegiatan	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	RENJA 2023			RENJA PERUBAHAN 2023			Berlaku/Berkurang	Sumber Dana	
			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Tahun 2024	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	DIPA 2023 Sebelum Perubahan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan			Target Capaian Kinerja Tahun 2024
	5.02.01.2.06.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		-	APBD
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Umum Perangkat Daerah	12 Laporan	1,870,000,000	674,629,000		Jumlah Laporan Penyediaan Umum Perangkat Daerah	12 Laporan	987,873,000	293,644,000
	5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	100,000,000	22,843,000	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	22,843,000	APBD
	5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	375,000,000	170,563,000	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	196,273,000	APBD
	5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	120,000,000	34,650,000	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	34,650,000	APBD
	5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	275,000,000	98,166,000	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	98,166,000	APBD
	5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 Dokumen	15,000,000	12,600,000	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 Dokumen	12,600,000	APBD
	5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	985,000,000	336,007,000	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	603,341,000	APBD
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1,580,000,000	341,912,000		Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	423,912,000	82,000,000
	5.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		-	APBD
	5.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	180,000,000	154,512,000	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	154,512,000	APBD
	5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang disediakan	20 Unit	200,000,000	-		Jumlah Mebel yang disediakan	20	28,800,000	APBD
	5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	1,200,000,000	187,400,000	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	240,600,000	APBD
	5.02.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan		-	APBD
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	2,500,000,000	1,725,586,000		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	1,725,586,000	-
	5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	25,000,000	13,500,000	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	13,500,000	APBD
	5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	350,000,000	210,000,000	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	210,000,000	APBD
	5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2,125,000,000	1,502,086,000	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,502,086,000	APBD

No	Kode Kegiatan	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	REKAPITULASI 2023				DPA 2023	Lokasi	REKAPITULASI PERUBAHAN 2023				Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana
			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Tahun 2024	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sebelum Perubahan			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Tahun 2024	Setelah Perubahan			
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1,250,000,000	544,400,000			Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	597,450,000	53,050,000		
	5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	150,000,000	90,332,000	BAPENDA Kab. Tanjung Barat		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	90,332,000	-	APBD	
	5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	45 Unit	425,000,000	307,830,000	BAPENDA Kab. Tanjung Barat		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	45 Unit	307,830,000	-	APBD	
	5.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara				BAPENDA Kab. Tanjung Barat		Jumlah Mebel yang dipelihara			-	APBD	
	5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	85 Unit	375,000,000	74,430,000	BAPENDA Kab. Tanjung Barat		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	85 Unit	127,480,000	53,050,000	APBD	
	5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	3 Unit	300,000,000	71,808,000	BAPENDA Kab. Tanjung Barat		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	3 Unit	71,808,000	-	APBD	
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	8,16%	8,747,000,000	1,640,942,200			Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	8,16%	1,749,377,200	108,435,000		
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	111,945,600,000	8,747,000,000	1,640,942,200			Jumlah Pendapatan Asli Daerah	111,945,600,000	1,749,377,200	108,435,000		
	5.02.04.2.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	295,000,000	13,102,000	BAPENDA Kab. Tanjung Barat		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	13,102,000	-	APBD	
	5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	3 Dokumen	300,000,000	39,785,000	BAPENDA Kab. Tanjung Barat		Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	3 Dokumen	39,785,000	-	APBD	
	5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	6 Laporan	552,000,000	157,180,000	BAPENDA Kab. Tanjung Barat		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	6 Laporan	157,180,000	-	APBD	
	5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Unit	550,000,000	235,750,000	BAPENDA Kab. Tanjung Barat		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Unit	235,750,000	-	APBD	
	5.02.04.2.01.05	Pendidikan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendidikan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	11 Laporan	500,000,000	257,234,000	BAPENDA Kab. Tanjung Barat		Jumlah Laporan Hasil Pendidikan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	11 Laporan	303,434,000	46,200,000	APBD	
	5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	4 Laporan	650,000,000	2,210,000	BAPENDA Kab. Tanjung Barat		Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	4 Laporan	2,210,000	-	APBD	

No	Kode Kegiatan	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	REKAPITULASI 2025		DIPA 2025		REKAPITULASI 2025			Sumber Dana	
			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Tahun 2024	Kebutuhan Dasar/Pagu Indikatif	Sebelum Perubahan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Tahun 2024		Seluruh Perubahan
	5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Didesuaikan NJO Pnya	2500 Objek Pajak	750.000.000	139.700.000	BAPEXDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Objek Pajak yang Didesuaikan NJO Pnya	2500 Objek Pajak	139.700.000	- APBD
	5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Kelengkapan Pajak Daerah	3 Dokumen	720.000.000	283.102.000	BAPEXDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Dokumen Kelengkapan Pajak Daerah	3 Dokumen	307.837.000	24.735.000 APBD
	5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	60 Layanan	150.000.000	2.031.600	BAPEXDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	60 Layanan	2.031.600	- APBD
	5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	8 Dokumen	495.000.000	31.436.000	BAPEXDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	8 Dokumen	31.436.000	- APBD
	5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	10 Dokumen	950.000.000	430.067.800	BAPEXDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	10 Dokumen	457.567.800	37.500.000 APBD
	5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	30 Dokumen	175.000.000	9.508.000	BAPEXDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	30 Dokumen	9.508.000	- APBD
	5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemertkaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemertkaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	11 Dokumen	400.000.000	8.760.800	BAPEXDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pemertkaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	11 Dokumen	8.760.800	- APBD
	5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	16 Laporan	250.000.000	30.975.000	BAPEXDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	16 Laporan	30.975.000	- APBD
JUMLAH							13.124.394.383			13.666.773.383	542.379.000

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun berkenaan. Hal ini dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja yang lebih efektif, efisien dan optimal dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Perubahan Rencana Kerja ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan Tahun 2025. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh jajaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta peran aktif semua pihak yang terkait.

Kuala Tungkal, 30 JUNI 2025

KEPALA BAPENDA,

